

Analisa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kab. HSS

Oleh :

M. Arliyan Syahrial, M.Pd,
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan besar dalam era otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip hemat, adil, dan setara, namun realitasnya masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program.

Pelaksanaan evaluasi menyeluruh pada pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk memperbaiki sistem tata kelola dan memaksimalkan pencapaian tujuan pemerintahan. Pengukuran kinerja keuangan daerah memerlukan keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi untuk mencapai tujuan *good governance* secara optimal.

Adapun yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menerapkan prinsip *value for money*, yang mana di lapangan masih banyak tantangan seperti kurangnya keterpaduan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), serta rendahnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat ukur kinerja tata kelola keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama, antara lain: perencanaan dan penganggaran, alokasi anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD.

Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD menjadi landasan pelaksanaan pengukuran di daerah. IPKD memberikan penilaian yang terukur terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tiga tingkatan kompetensi (rendah, sedang, tinggi) dan tiga kategori hasil (baik, perlu perbaikan, sangat perlu perbaikan). Pendekatan pengukuran kinerja melalui indeks komposit seperti IPKD sejalan dengan praktek internasional yang dilakukan di berbagai negara



Ringkasan

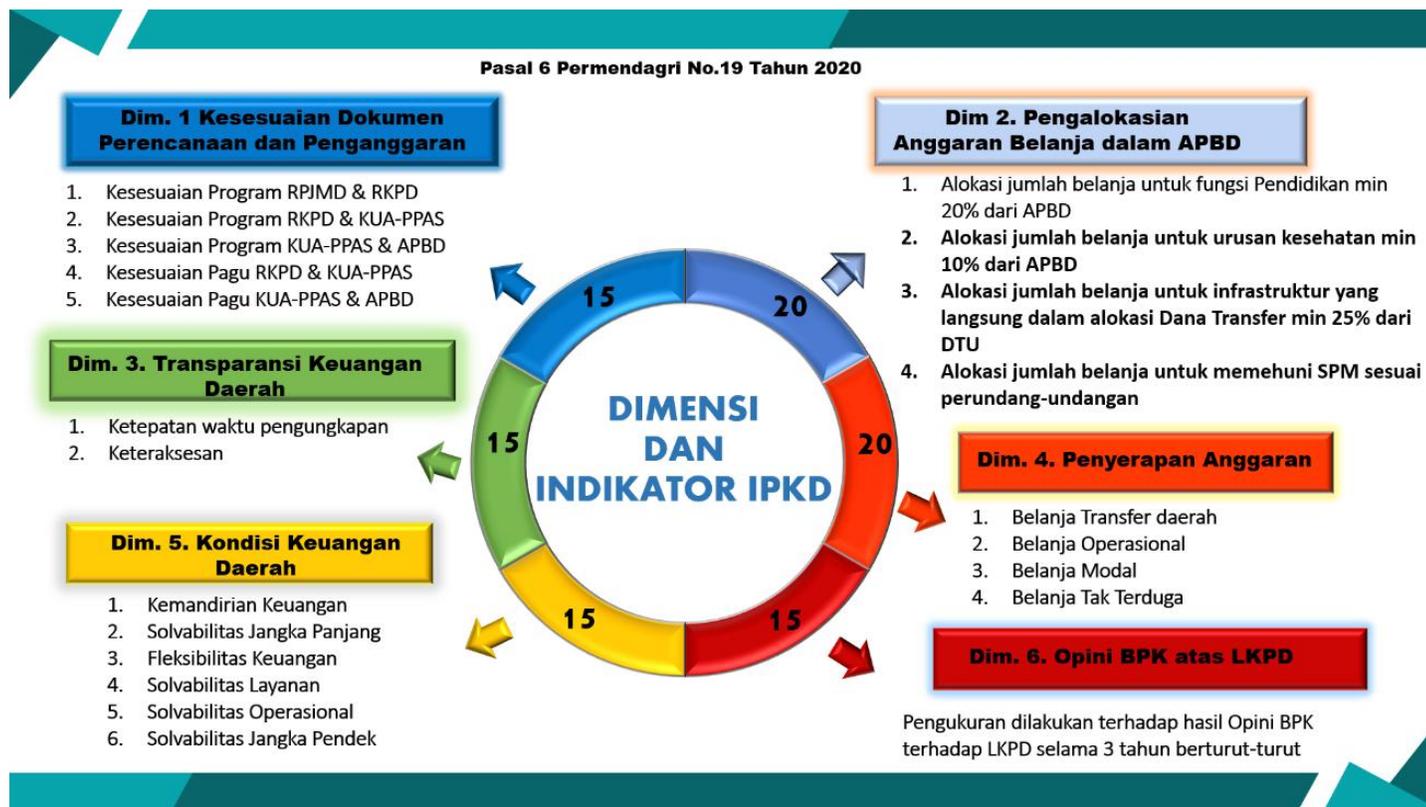
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). IPKD mengukur seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Nilai IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi, pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 73,9401 meningkat menjadi 77.695 di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan nilai menjadi 77.14.

Evaluasi terhadap Enam Dimensi pembentuk IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 memperlihatkan data-data sebagai berikut :

- Tiga dimensi yang memperoleh nilai maksimal dan ini perlu dipertahankan, yaitu Dimensi pengalokasi anggaran belanja dalam APBD (dimensi 2 yang memiliki bobot 20), Dimensi transparansi keuangan daerah (dimensi 3 yang memiliki bobot 15) dan Dimensi opini BPK atas LKPD (dimensi 6 yang memiliki bobot 15).
- Satu Dimensi yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun namun masih belum mencapai nilai maksimal, yaitu : Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (dimensi 1 yang memiliki bobot 15).
- Satu Dimensi yang nilainya tidak mengalami perubahan, yaitu Dimensi penyerapan anggaran (dimensi 4 yang memiliki bobot 20) dari tahun ke tahun nilai dimensi ini tidak mengalami pergerakan dengan nilai 15. Dimensi 4 ini terkait dengan penyerapan belanja transfer daerah, belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dan yang masih sangat minim adalah penyerapan belanja tidak terduga, dimana diperlukan penyerapan anggaran belanja tidak terduga minimal 80%.
- Satu Dimensi yang mengalami penurunan, yaitu Dimensi kondisi keuangan daerah (dimensi 5 yang memiliki bobot 15). Dimensi ini memiliki kaitan erat dengan kemandirian keuangan, solvabilitas jangka Panjang, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek. Khusus terkait dengan kemandirian keuangan daerah maka ada hubungan erat dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang merupakan ukuran salah satunya untuk mencerminkan kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan dan membelanjakannya secara efektif.

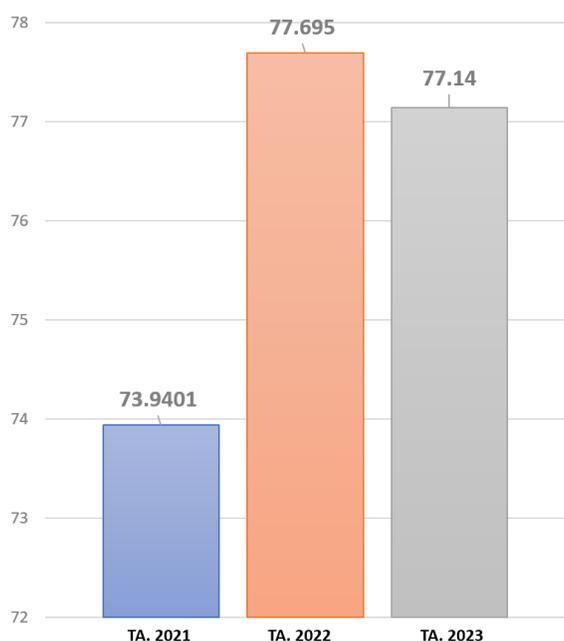
Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2020 pasal 6 sampai dengan pasal 14 ditentukan dimensi, bobot dimensi dan indikator dimensi IPKD. Dimana dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki bobot 15. Dimensi pengalokasi anggaran belanja dalam APBD memiliki bobot 20. Dimensi transparansi keuangan daerah memiliki bobot 15. Dimensi penyerapan anggaran memiliki bobot 20. Dimensi kondisi keuangan daerah memiliki bobot 15. Dimensi opini BPK atas LKPD memiliki bobot 15. Rincian dimensi, bobot dimensi dan indikator dimensi IPKD terlihat dalam gambar berikut.



TINJAUAN KEBIJAKAN

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). IPKD mengukur seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pembentukan tim pengukuran IPKD Kabupaten, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/322/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.



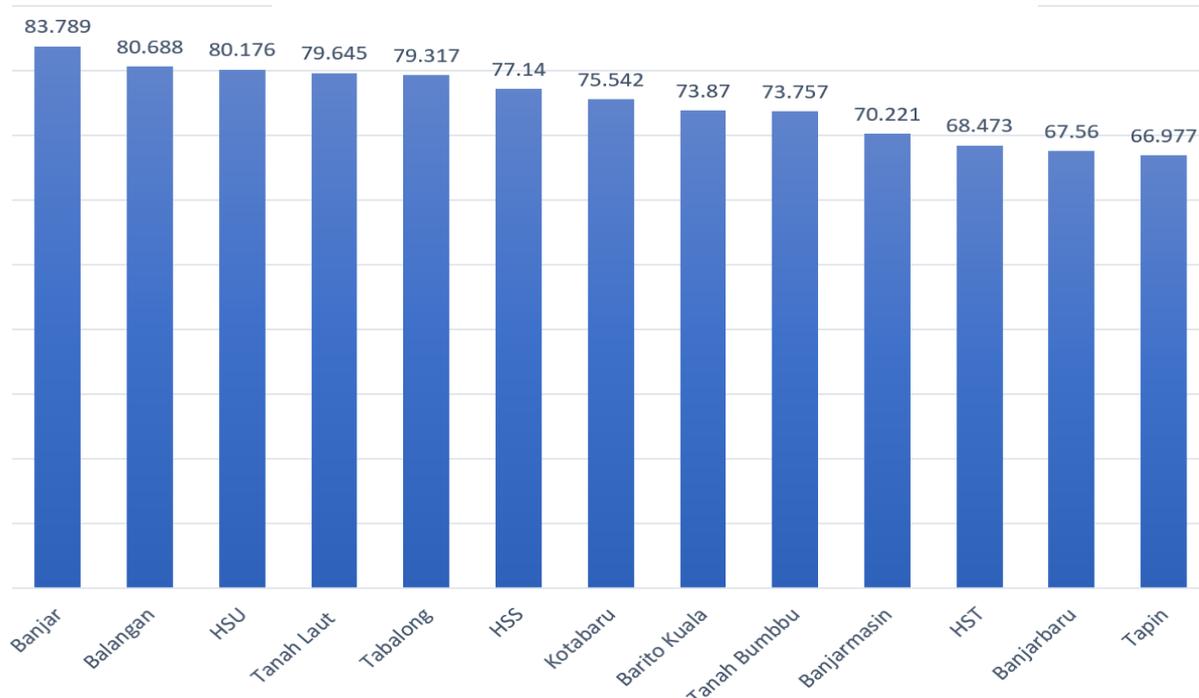
Nilai IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dimana pada Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan nilai dari sebelumnya, dimana pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 73,9401 meningkat menjadi 77.695 di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan nilai menjadi 77.14.

IPKD Tahun Anggaran 2022 diukur pada tahun 2023 dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022. Sedangkan IPKD Tahun Anggaran 2023 diukur pada tahun 2024 dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.

Fluktuasi nilai IPKD ini dapat dianalisa pada enam dimensi yang menjadi pembentuk IPKD Kabupaten. Analisa dan evaluasi IPKD menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel serta transparan

Tentu penurunan nilai indeks ini ditentukan oleh dimensi dan indikator dimensi yang mengalami penurunan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lebih khusus tim IPKD Kabupaten. Evaluasi nilai IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang hasilnya menjadi dasar perbaikan dan peningkatan di tahun berikutnya.

IPKD Kab/Kota Se-KalSel Tahun Anggaran 2023



Secara perbandingan nilai IPKD Kabupaten / Kota se-Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2023, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di posisi ke – 6 dari 13 Kabupaten / Kota. Kabupaten Hulu Sungai Selatan diapit oleh Kabupaten Tabalong dengan nilai 79,317 dan Kabupaten Kotabaru dengan nilai 75,542. Pada Tahun Anggaran 2023 ini Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten tertinggi nilai IPKD se-Kalimantan Selatan dengan nilai 83,789. Sedangkan Kabupaten Tapin menjadi yang terendah dengan nilai indeks sebesar 66,977.

Perbandingan nilai antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan ini memiliki beberapa manfaat penting dan dapat membantu mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan, memotivasi untuk terus berakselerasi, dan mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan. Perbandingan nilai dapat memotivasi kabupaten untuk bersaing secara sehat dalam meningkatkan kinerja. Kabupaten/Kota yang tertinggal mungkin akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan, sementara Kabupaten /Kota yang sudah maju akan terus berupaya mempertahankan atau meningkatkan keunggulannya

Selain perbandingan nilai IPKD Kabupaten / Kota se-Kalimantan Selatan salah satu analisa yang juga dapat dilakukan adalah analisa perbandingan nilai dimensi IPKD Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Kab. Hulu Sungai Selatan. Dimana dalam perbandingan ini diketahui fluktuasi perkembangan masing-masing dimensi. Secara ringkas hanya dimensi kondisi keuangan daerah (dimensi 5) yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (dimensi 1 yang memiliki bobot 15) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan nilai 8,9841, Tahun Anggaran 2022 mendapatkan nilai 9,212 dan pada Tahun Anggaran 2023 terus meningkat dengan mendapatkan nilai sebesar 10,307. Dimensi ini dapat terus ditingkatkan salah satunya dengan konsistensi pagu antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Dimensi pengalokasi anggaran belanja dalam APBD (dimensi 2 yang memiliki bobot 20) dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan nilai. Di mana pada Tahun Anggaran 2021, dimensi 2 ini mendapatkan nilai sebesar 19,1379, dan pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan nilai 19,31. Dan puncaknya pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan nilai sebesar 20. Ini merupakan nilai sempurna dan paling maksimal pada dimensi 2.

Selanjutnya Dimensi transparansi keuangan daerah (dimensi 3 yang memiliki bobot 15). Dimensi 3 ini dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan nilai. Di mana pada Tahun Anggaran 2021, dimensi ini mendapatkan nilai sebesar 10,8621 dan pada Tahun Anggaran 2022 dan juga pada Tahun Anggaran 2023 sama-sama mendapatkan nilai sempurna dengan nilai 15.

Dimensi penyerapan anggaran (dimensi 4 yang memiliki bobot 20) dari tahun ke tahun nilai dimensi ini tidak mengalami pergerakan. Dimana pada Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 sama mendapatkan nilai 15. Dimensi 4 ini terkait dengan penyerapan belanja transfer daerah, belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dan yang masih sangat minim adalah penyerapan belanja tidak terduga, dimana diperlukan penyerapan anggaran belanja tidak terduga minimal 80%.

Dimensi kondisi keuangan daerah (dimensi 5 yang memiliki bobot 15) merupakan satu-satunya dimensi yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan nilai. Di mana pada Tahun Anggaran 2021, dimensi 5 ini mendapatkan nilai sebesar 4,956, dan pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan nilai 4,173. Dan pada Tahun Anggaran 2023 turun dengan drastis, dan hanya mendapatkan nilai sebesar 1,832.

Adapun dimensi opini BPK atas LKPD (dimensi 6 yang memiliki bobot 15). Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mencapai nilai maksimal 15 di Tahun Anggaran 2021, 2022 dan juga 2023. Dimensi 6 ini pengukurannya dilakukan terhadap hasil Opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab HSS dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi.

Perbandingan Nilai Dimensi IPKD Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Kab. Hulu Sungai Selatan



Nilai Dimensi IPKD Kab HSS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hanya dimensi 5 yang terus mengalami banyak penurunan sehingga perlu peningkatan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah.

Dimensi 5 atau dimensi kondisi keuangan daerah (memiliki bobot 15) dan pada Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya mendapatkan nilai 1,832. Dimensi ini memiliki kaitan erat dengan kemandirian keuangan, solvabilitas jangka Panjang, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publiknya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Kemandirian keuangan daerah ini sangat erat berhubungan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Adapun IKFD merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu daerah dalam mengelola keuangannya, mencerminkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan dan membelanjakannya secara efektif.

IPKD lebih khusus Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah - Kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan yang saling terkait dan erat dengan IKFD. Dimana IKFD yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang kuat, yang merupakan indikator kemandirian keuangan. Daerah dengan IKFD tinggi cenderung lebih mandiri dalam membiayai kegiatan daerah dan lebih sedikit bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di sisi yang lain Pemerintah daerah dapat menggunakan data IKFD untuk merencanakan anggaran daerah, mengidentifikasi potensi pendapatan, dan menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah pusat juga menggunakan peta kapasitas fiskal daerah (yang didasarkan pada IKFD) sebagai dasar dalam penyaluran dana perimbangan dan berbagai program dukungan keuangan kepada daerah.

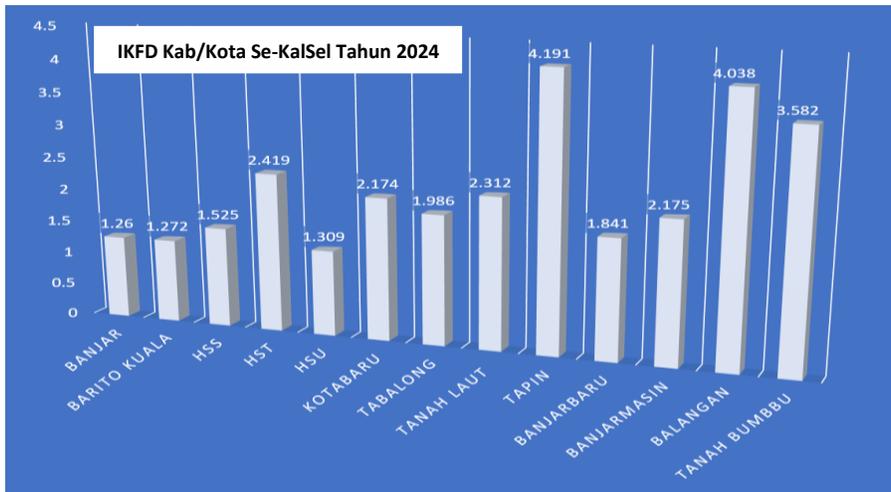
Dengan memahami kemandirian keuangan daerah dan IKFD, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait IKFD, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah pernah melakukan analisa yang tertuang dalam Policy Brief No. 05, Januari 2021 tentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Policy Brief itu dilakukan perbandingan IKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2020. Pada kesempatan ini akan kembali diperbaharui datanya sebagai bahan perbaikan IPKD lebih khusus Dimensi 5 IPKD (Kondisi Keuangan Daerah - Kemandirian keuangan daerah).

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2024

Tahun	Nilai Indeks	Kategori	Surat
2014	1.0374	tinggi	PMK Nomor : 054/PMK.07/2014 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2015	1.1900	tinggi	PMK Nomor : 033/PMK.07/2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2016	1.1900	tinggi	PMK Nomor : 037/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2017	0.7900	sedang	PMK Nomor : 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2018	1.0570	sedang	PMK Nomor : 107/PMK.07/2018 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2019	0.7710	sedang	PMK Nomor : 126/PMK.07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2020	0.5680	rendah	PMK Nomor : 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2021	0,822	sedang	PMK Nomor : 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2022	1,798	sedang	PMK Nomor : 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*
2023	1,626	tinggi	PMK Nomor : 84/PMK.07/2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2024	1,525	tinggi	PMK Nomor : 65/PMK.07/2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*

*ada perubahan rentang kategori dalam PMK yang signifikan



Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2014 - 2020 secara nilai dan juga kategori mengalami trend penurunan. Namun masuk periode tahun 2021-2024 mengalami trend peningkatan, walaupun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan nilai tahun 2022. Secara kategori Kabupaten Hulu Sungai Selatan pernah masuk dalam kategori tinggi (tahun 2014, 2015 dan 2016) lalu turun ke kategori sedang (tahun 2017, 2018 dan 2019) lalu turun lagi ke kategori rendah (tahun 2020). Kategorinya kembali naik ke kategori sedang (tahun 2021 dan 2022) dan naik ke kategori tinggi (tahun 2023 dan 2024).

Namun kalau dilihat perbandingan nilai IKFD Kabupaten / Kota se-KalSel tahun 2024, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih tertinggal jauh di bawah Kabupaten / Kota yang lain. Dimana mayoritas sudah masuk pada nilai indeks 2 bahkan Kabupaten Tapin dan Balangan di atas nilai indeks 4.

Atas dasar inilah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) juga mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) lebih khusus pada Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah, terkait kemandirian keuangan daerah. Dimana keduanya (IKFD dan Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah-IPKD) dalam 3 tahun terakhir sama-sama mengalami penurunan, dan tentu perlu ada kebijakan tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan evaluasi.

Evaluasi Dimensi IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 memperlihatkan :

- Tiga dimensi yang memperoleh nilai maksimal dan ini perlu dipertahankan, yaitu Dimensi pengalokasi anggaran belanja dalam APBD (dimensi 2 yang memiliki bobot 20), Dimensi transparansi keuangan daerah (dimensi 3 yang memiliki bobot 15) dan Dimensi opini BPK atas LKPD (dimensi 6 yang memiliki bobot 15).
- Satu Dimensi yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun namun masih belum mencapai nilai maksimal, yaitu : Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (dimensi 1 yang memiliki bobot 15), perlu untuk terus ditingkatkan salah satunya dengan konsistensi pagu antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- Satu Dimensi yang nilainya tidak mengalami perubahan, yaitu Dimensi penyerapan anggaran (dimensi 4 yang memiliki bobot 20) dari tahun ke tahun nilai dimensi ini tidak mengalami pergerakan dengan nilai 15. Dimensi 4 ini terkait dengan penyerapan belanja transfer daerah, belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dan yang masih sangat minim adalah penyerapan belanja tidak terduga, dimana diperlukan penyerapan anggaran belanja tidak terduga minimal 80%.
- Satu Dimensi yang mengalami penurunan, yaitu Dimensi kondisi keuangan daerah (dimensi 5 yang memiliki bobot 15) merupakan satu-satunya dimensi yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan nilai. Dimensi ini memiliki kaitan erat dengan kemandirian keuangan, solvabilitas jangka Panjang, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

Khusus terkait dengan kemandirian keuangan daerah maka ada hubungan erat dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang merupakan ukuran salah satunya untuk mencerminkan kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan dan membelanjakannya secara efektif.